

LAYANAN ADVOKASI HUKUM – BAWASLU

2023

PERBAWASLU NO. 6 BN 2023/NO. 396, 22 HLM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG LAYANAN ADVOKASI HUKUM

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan hasil evaluasi layanan advokasi hukum bagi pengawas pemilihan umum dan/atau pegawai kesekretariatan serta untuk mengakomodir perubahan struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022, Perpres No. 68 Tahun 2018, PERBAWASLU No. 1 Tahun 2021, dan PERBAWASLU No. 3 Tahun 2022.

- Beberapa pengaturan mendasar yang menjadi poin pengaturan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2023 yaitu prosedur dan batasan advokasi hukum, hak dan kewajiban serta batasan pemberi dan penerima advokasi hukum termasuk juga format permohonan dan kajian hukum dalam advokasi hukum.

CATATAN : - Peraturan Bawaslu ini ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2023.

- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 22 Mei 2023.